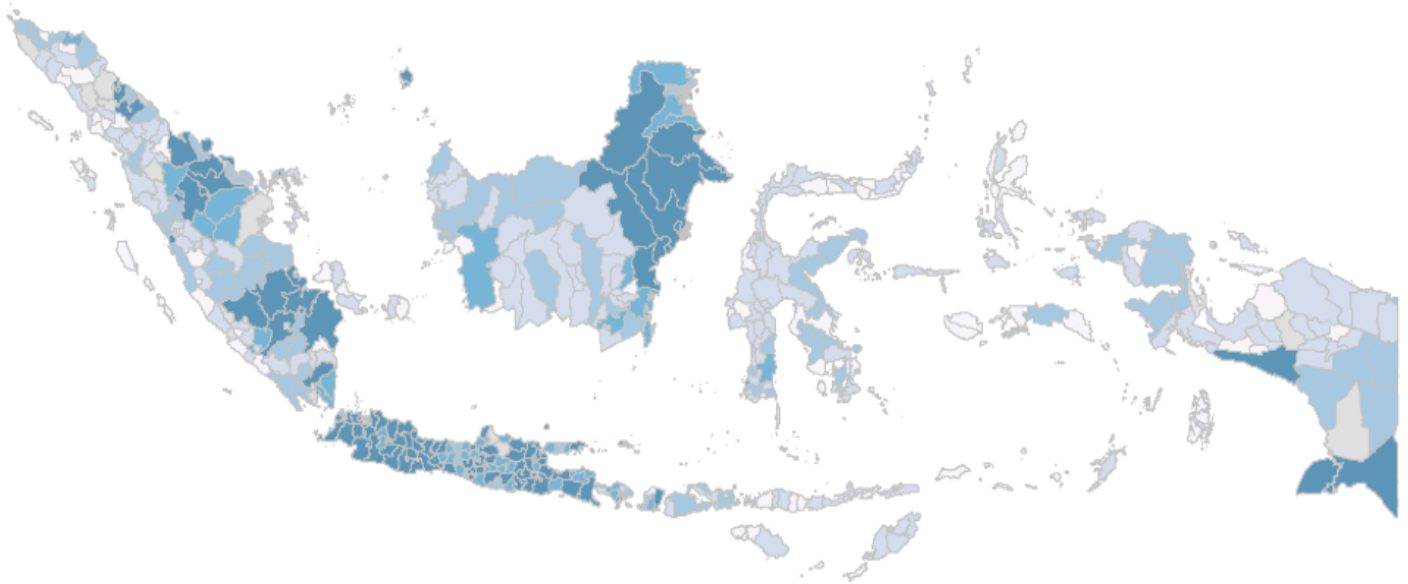


PROFIL APBD TA 2012



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

SUBDIT DATA KEUANGAN DAERAH

Profil APBD TA 2012

Pendahuluan

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran vital dalam mengimplementasikan rencana kerja pembangunan daerah dan juga secara tak langsung mendukung rencana pembangunan nasional. Dalam hal ini, Pemerintah pusat memiliki kepentingan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan daerah guna penyesuaian dengan kebijakan fiskal nasional. Oleh sebab itu, data yang terpercaya (TRUST – complete, Reliable, Up to date, Secure dan accurate) mengenai keuangan daerah sangat penting keberadaannya. Terkait hal tersebut Direktorat EPIKD, Ditjen Perimbangan Keuangan dalam hal ini Subdit Data Keuangan Daerah memiliki tugas untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pengolahan data keuangan daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya terkait penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional. Data yang terkumpul selanjutnya diolah sedemikian rupa hingga mendapatkan gambaran umum mengenai keuangan daerah. Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memaparkan kondisi APBD TA 2012 dan sebagai awal dalam melakukan tinjauan keuangan daerah yang lebih mendalam.

Data dan Teknik Penyajian

Data yang disajikan dalam *review* ini meliputi sebanyak 510 Pemda yang terdiri dari 33 Provinsi, 384 Kabupaten dan 93 Kota yang berupa data ringkasan APBD TA 2012 (lampiran 1 Perda APBD). Data disajikan dalam bentuk *chart* dan perhitungan statistik sederhana. Pada penyajian data ini tidak dilakukan konsolidasi data mengingat keterbatasan informasi dan detail data untuk melakukan konsolidasi. Sehingga untuk menghindari perhitungan ganda atas beberapa akun resiprokal (akibat belum dilakukan konsolidasi) maka penyajian data dibedakan antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota.

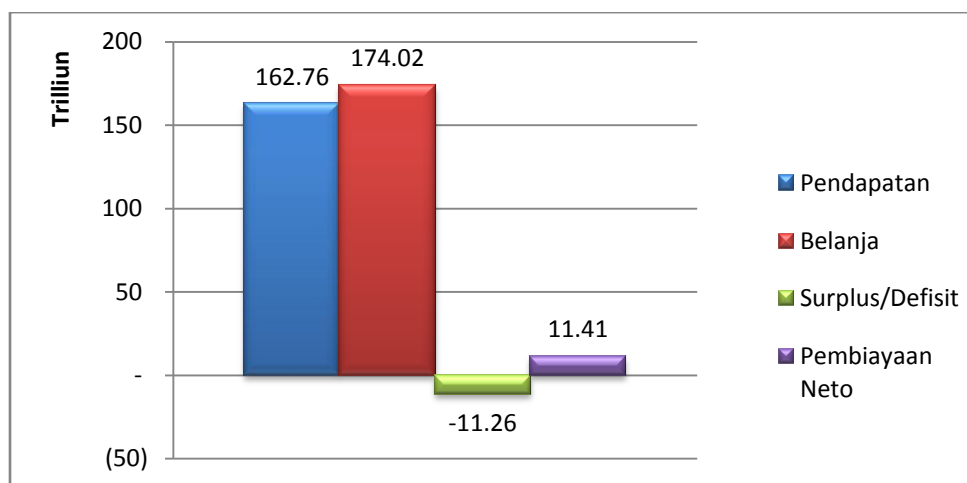
Selain itu juga dilakukan modifikasi dalam format pelaporan yang pada awalnya sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dan dimodifikasi menjadi format yang digunakan untuk penyajian data ini dengan maksud untuk penyeragaman dan penyerdehanaan analisis. Dalam tulisan ini, pos pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer dari pusat dan lain-lain pendapatan yang sah sedangkan belanja diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja lainnya dan transfer antar pemda (lihat lampiran).

Gambaran Umum APBD TA 2012

Secara umum Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sedangkan Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Namun untuk alasan penyeragaman dan penyederhanaan analisis maka dilakukan modifikasi pengelompokan komponen-komponen dalam struktur APBD sebagaimana telah disebutkan diatas.

Gambar dibawah ini menunjukkan struktur APBD Provinsi TA 2012 yang secara kumulatif, pendapatannya ditargetkan mencapai Rp162,76 triliun sedangkan belanja sebesar Rp174,02 triliun. Dengan demikian terjadi defisit anggaran secara kumulatif sebesar Rp11,26 triliun. Dari 33 Provinsi yang ada, hanya 4 Provinsi yang melakukan penganggaran surplus sedangkan lainnya melakukan penganggaran defisit. Keempat provinsi dengan penganggaran surplus antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua.

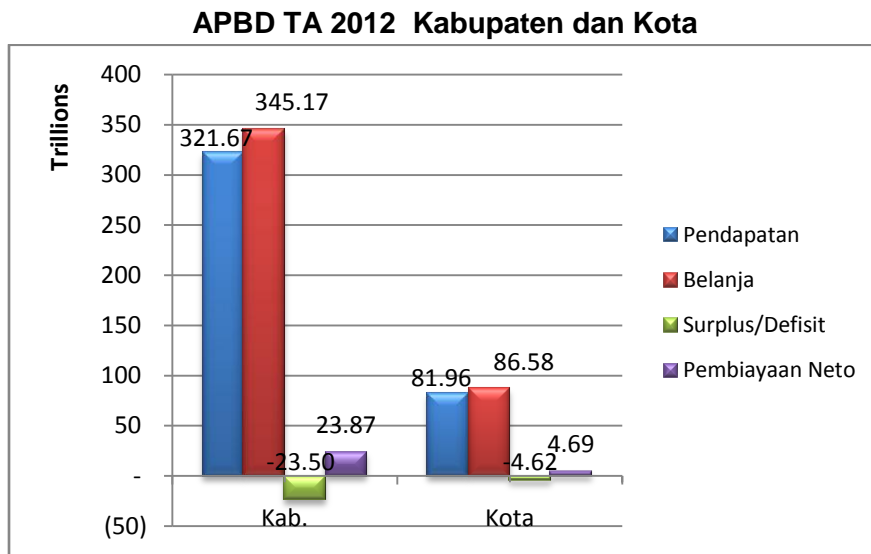
APBD TA 2012
Pemerintah Daerah Provinsi



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Tidak hanya di Provinsi yang melakukan penganggaran defisit, di Kabupaten maupun Kota pun juga demikian. Dengan total pendapatan daerah sebesar Rp321,67 triliun dan belanja yang lebih besar yaitu mencapai 345,17 triliun maka total defisit di Kabupaten mencapai Rp23,5 triliun. Demikian pula di Kota, dengan total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp81,96 triliun dan alokasi belanja sebesar Rp86,58 triliun maka akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp4,62

triliun. Defisit pada Kabupaten sebesar Rp23,5 triliun tersebut dibiayai dengan SiLPA tahun lalu dan komponen-komponen pembiayaan lainnya sebesar Rp23,87 triliun sehingga akan terjadi SiLPA TA berjalan sebesar Rp369,4 miliar. Sementara itu, pembiayaan untuk defisit anggaran di Kota sebesar Rp4,69 triliun sehingga akan terjadi SiLPA TA berjalan sebesar Rp72,7 miliar pada Kota.



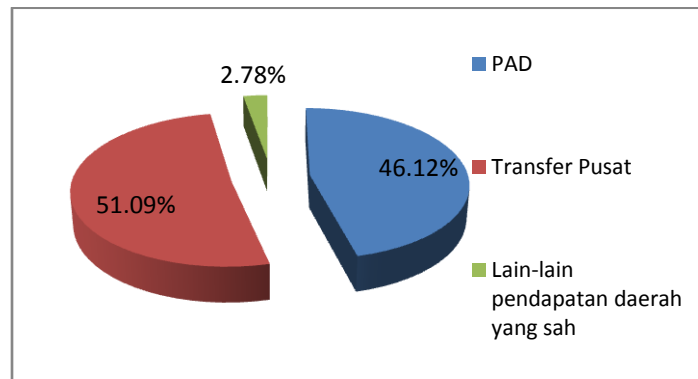
Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Meskipun secara kumulatif direncanakan terjadi defisit anggaran baik di Kabupaten maupun Kota, namun terdapat juga daerah yang merencanakan anggaran surplus dan berimbang. Dari sebanyak 477 Kabupaten/Kota terdapat 63 Kabupaten/Kota yang merencanakan anggaran surplus dan sebanyak 9 Kabupaten/Kota yang merencanakan anggaran berimbang sedangkan 405 Kabupaten/Kota merencanakan anggaran defisit.

Pendapatan Daerah

Secara kumulatif Pendapatan di Pemda Provinsi didominasi oleh transfer dari pusat sebesar 51% dari total pendapatan atau mencapai nilai nominal sebesar Rp83,15 triliun. Selanjutnya sebesar 46% pendapatan daerahnya di targetkan berasal dari PAD dengan nominal mencapai Rp75,07 triliun sedangkan hanya sebesar 3% pendapatan daerah yang ditargetkan bersumber pada lain-lain pendapatan atau hanya sebesar Rp4,53 triliun.

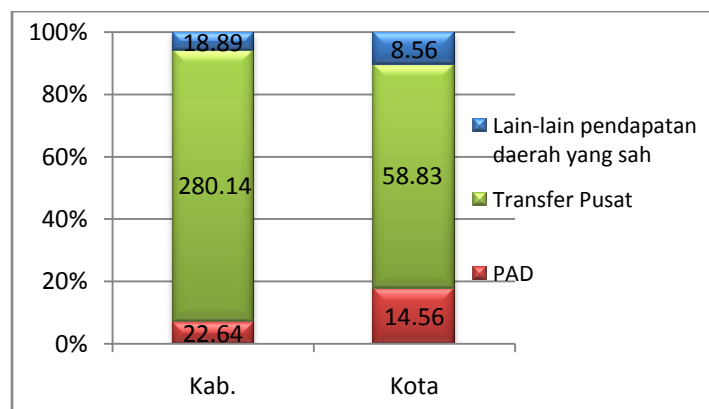
Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi TA 2012



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Berbeda dengan komposisi pendapatan daerah provinsi, dominasi Transfer pusat pada pendapatan daerah Kabupaten/Kota sangat besar. Di Kabupaten misalnya, dominasi transfer pusat mencapai 87,1% atau sebesar Rp280,14 triliun sedangkan di Kota mencapai 71,8% atau sebesar Rp58,83 triliun. Sementara itu pada PAD, target dari seluruh Kabupaten pada TA 2012 ini mencapai Rp22,64 triliun atau hanya sebesar 7% dari target pendapatan daerah Kabupaten sedangkan di Kota, target PAD mencapai Rp14,56 triliun atau sebesar 17,8% dari pendapatan Kota.

Komposisi Pendapatan Daerah Provinsi TA 2012

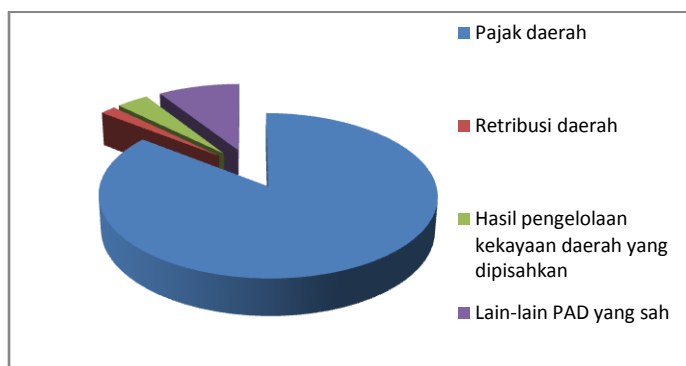


Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pajak Daerah tetap menjadi sumber utama dari PAD Provinsi. Pada TA 2012 ini, Target pajak daerah yang dihasilkan sebesar Rp64,2 triliun atau mencapai 85,4% dari total PAD Provinsi sedangkan 15% sisanya ditargetkan bersumber dari Lain-lain PAD, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah masing-masing sebesar 9,11%, 3,61% dan 1,74% dari total PAD

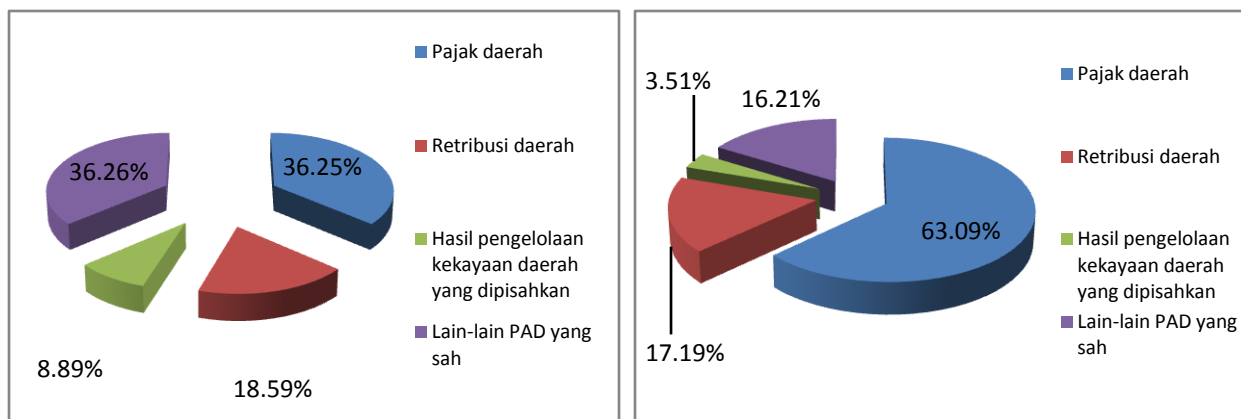
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Lain halnya dengan Provinsi, Pajak Daerah yang ditargetkan oleh Kabupaten tidak terlalu mendominasi PAD. Pada Gambar dibawah terlihat bahwa pajak daerah Kabupaten yang ditargetkan sebesar Rp8,2 triliun hanya sebesar 36,25% dari total PAD. Sebesar Rp8,2 triliun juga ditargetkan dari lain-lain PAD Kabupaten sedangkan sisanya ditargetkan bersumber dari retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan masing-masing sebesar Rp4,2 triliun dan Rp2 triliun.

Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota



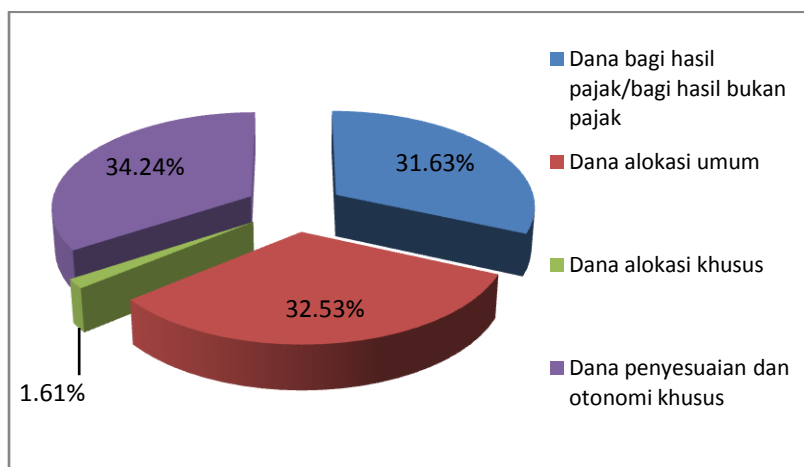
Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Hal yang berbeda pula tampak pada komposisi PAD Kota, dimana pajak daerah mendominasi PAD sebesar 63,1% atau dianggarkan mencapai Rp9,1 triliun. Pemungutan retibusi daerah Kota dianggarkan sebesar Rp2,5 triliun atau 17,19% dari total PAD Kota sedangkan sisanya dianggarkan bersumber dari lain-lain PAD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah masing-masing Rp2,3 triliun dan Rp510 miliar.

Transfer Pusat

Komposisi Transfer dari Pusat kepada Provinsi yang dianggarkan pada TA 2012 ini relatif merata. Sebagaimana terlihat dari gambar dibawah ini, sebesar Rp83,5 triliun, sebesar 34,24%-nya dianggarkan dari dana Otsus dan Penyesuaian atau mencapai Rp28,46 triliun. 32,5%-nya dianggarkan dari Dana Alokasi Umum atau sebesar Rp27 triliun. Sementara itu Dana Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp26,29 triliun dan sisanya dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus dengan hanya sebesar Rp1,3 Triliun.

Komposisi Pendapatan Transfer dari Pusat Kepada Provinsi

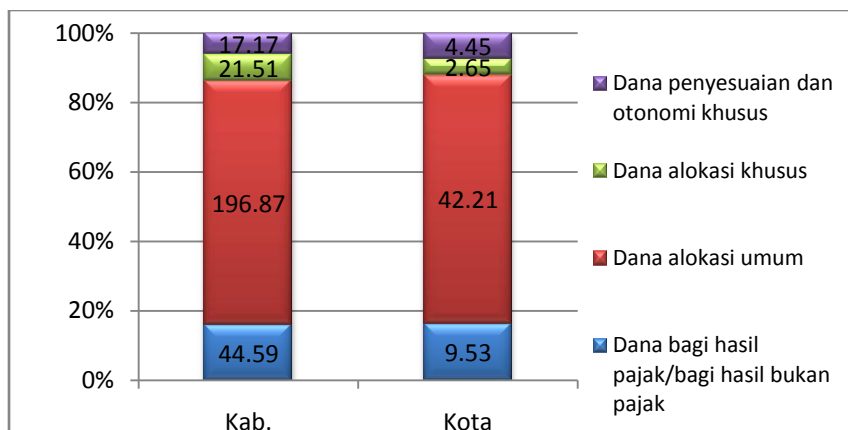


Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Berbeda dengan komposisi Transfer Pusat di Provinsi, komposisi Transfer Pusat di Kabupaten maupun Kota didominasi oleh Dana Alokasi Umum. Di Kabupaten misalnya, sebesar Rp280,14 triliun Transfer dari Pusat, 70,3%-nya atau mencapai Rp196,87 triliun dianggarkan bersumber dari Dana Alokasi Umum. Hal serupa juga terjadi di Kota, sebesar Rp58,83 triliun transfer dari Pusat, 71,8% dianggarkan bersumber dari Dana Alokasi Umum atau mencapai nominal Rp42,21 triliun. Selanjutnya, komponen terbesar kedua pada Transfer Pusat ke Kabupaten maupun Kota adalah Dana Bagi Hasil. Pada TA 2012 ini, DBH dianggarkan sebesar Rp44,59 triliun atau 15,9% dari seluruh transfer pusat ke Kabupaten dan Rp9,53 triliun atau 16,2% dari seluruh transfer pusat ke Kota. Sementara itu sebagian kecil

sisanya dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Otsus dan Penyesuaian. Pada TA 2012 ini Dana Alokasi khusus dan Dana Otsus dan Penyesuaian dianggarkan masing-masing hanya sebesar Rp21,51 triliun dan Rp17,17 triliun untuk Kabupaten sedangkan untuk Kota masing-masing sebesar Rp2,65 triliun dan Rp4,45 triliun.

Komposisi Transfer dari Pusat Kepada Kabupaten dan Kota

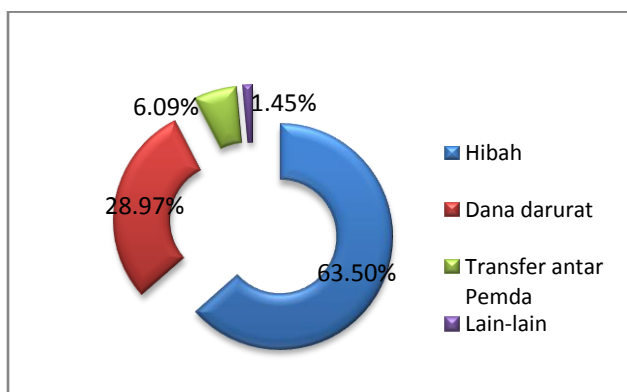


Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Lain-lain Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Hibah, Dana Darurat, Transfer antar Pemda dan lain-lain. Adapun pada TA 2012 ini, komponen yang dianggarkan tertinggi di Provinsi adalah pendapatan hibah yaitu sebesar Rp2,87 triliun atau mencapai 63,5% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Provinsi. Selanjutnya dana darurat dianggarkan sebesar Rp1,3 triliun sedangkan sisanya dianggarkan dari transfer antar pemda dan lain-lain masing-masing sebesar Rp275,9 miliar dan Rp65,54 miliar.

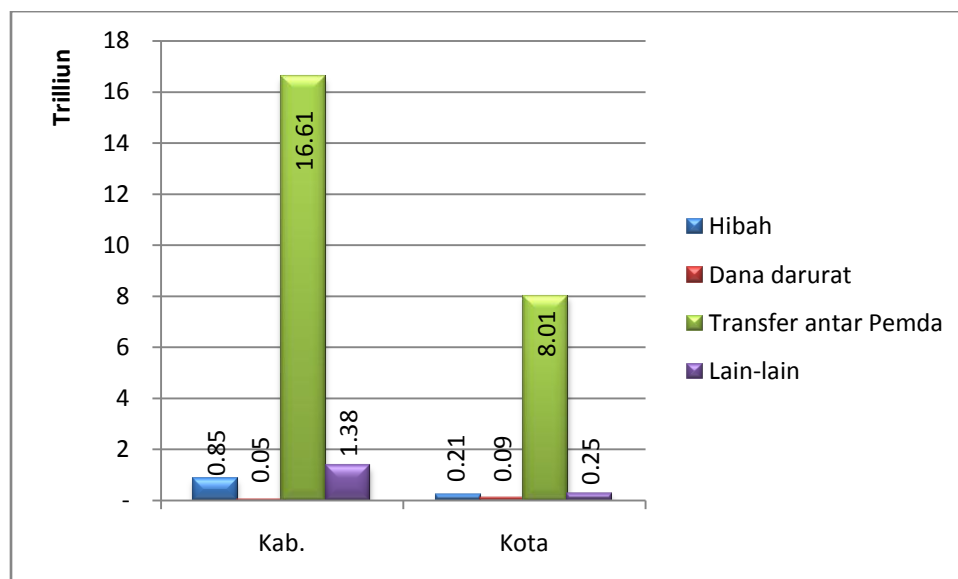
Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah APBD TA 2012 Provinsi



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Jika Lain-lain Pendapatan Daerah Provinsi didominasi oleh pendapatan hibah, di Kabupaten maupun Kota lain-lain Pendapatan Daerah didominasi dari Pendapatan Transfer antar Pemda. Adapun dalam APBD TA 2012 ini, secara kumulatif nilainya mencapai Rp16,61 triliun untuk Kabupaten dan Rp8,01 triliun untuk Kota. Sebagian lagi sisanya terbagi atas lain-lain, pendapatan hibah dan dana darurat masing-masing hanya sebesar Rp1,38 triliun, Rp853 miliar dan Rp50 miliar untuk Kabupaten sedangkan untuk Kota beturut-turut adalah Rp250 miliar, Rp212 miliar dan Rp92 miliar.

Komposisi Lain-Lain Pendapatan Daerah APBD TA 2012 Kabupaten dan Kota

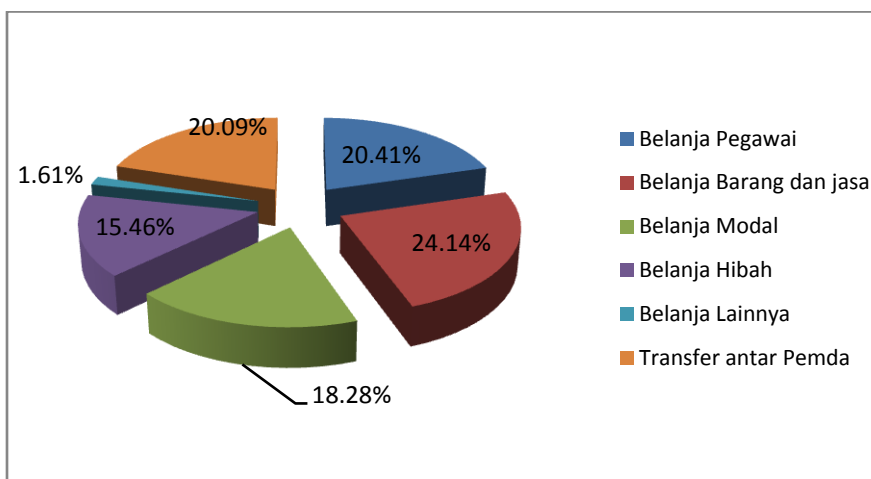


Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Belanja Daerah

Komposisi dari seluruh belanja daerah Provinsi yang dialokasikan pada TA 2012 relatif merata. Dari sebesar Rp174 triliun anggaran belanja daerah seluruh provinsi, 24,14%nya dialokasikan untuk Belanja barang dan jasa atau senilai dengan Rp42 triliun. Porsi ini merupakan porsi terbesar dari alokasi belanja daerah Provinsi. Alokasi terbesar berikutnya adalah belanja pegawai yang mencapai Rp35,52 triliun atau sebesar 20,4% dari total belanja daerah Provinsi. Tidak jauh berbeda dengan belanja pegawai, belanja transfer antar pemda juga dialokasikan cukup tinggi. Dalam APBD TA 2012 ini, porsi belanja transfer mencapai 20,09% dari total belanja daerah Provinsi atau sebesar Rp34,95 triliun. Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp31,81 triliun sedangkan sebesar Rp26,9 triliun dan Rp2,8 triliun dialokasikan masing-masing untuk belanja hibah dan belanja lainnya.

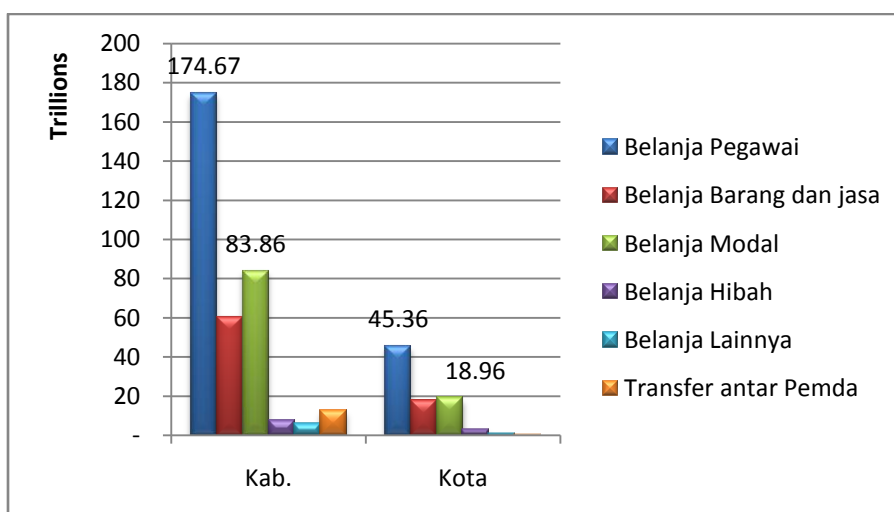
Komposisi Belanja Daerah APBD TA 2012 Provinsi



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Jika komposisi belanja daerah di Provinsi relatif merata tidak demikian dengan komposisi belanja daerah di Kabupaten maupun Kota. Lebih dari separuh anggaran dialokasikan untuk belanja pegawai. Total belanja pegawai untuk Kabupaten mencapai Rp174,66 triliun atau sebesar 50,6% dari total belanja daerah Kabupaten sedangkan untuk Kota, total belanja pegawainya mencapai 52,4% dari total belanja daerah atau sebesar Rp45,36 triliun. Selanjutnya adalah belanja modal, dengan alokasi sebesar Rp83,73 triliun untuk Kabupaten dan Rp18,96 triliun untuk Kota.

Komposisi Belanja Daerah APBD TA 2012 Kabupaten dan Kota



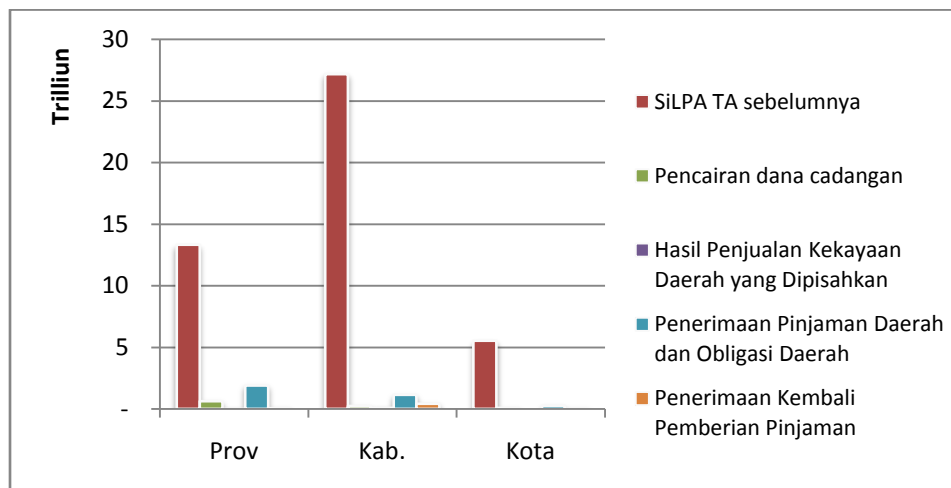
Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Salah satu yang membedakan komposisi belanja antara Kabupaten dan Kota adalah pada komponen belanja transfer antar pemda dimana porsi belanja ini relatif lebih besar pada Kabupaten daripada di Kota. Di Kabupaten porsinya mencapai 3,7% dari total belanja daerah Kabupaten atau sebesar Rp12,74 triliun sedangkan di Kota alokasinya hanya sebesar 0,4% dari total belanja daerah Kota atau hanya sebesar Rp346 miliar.

Pembiayaan Daerah

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa terjadi defisit anggaran pada Provinsi sebesar Rp11,26 triliun. Defisit ini tentunya harus dibiayai dengan berbagai sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SiLPA TA sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Terlihat pada gambar dibawah SiLPA TA sebelumnya menjadi sumber utama dalam pembiayaan defisit baik pada Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Secara total SiLPA yang dianggarkan mencapai Rp45,99 triliun. Sementara itu pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dan obligasi daerah direncanakan mencapai Rp3,3 triliun.

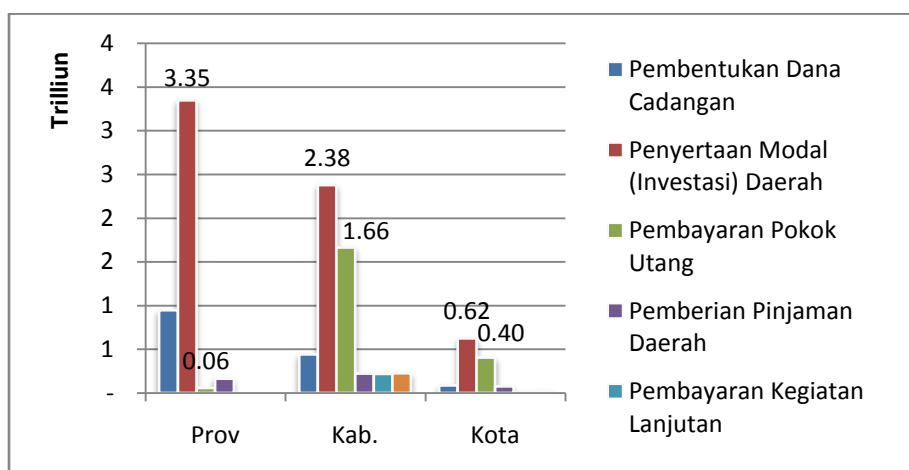
Penerimaan Pembiayaan APBD TA 2012



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Dalam membiayai defisit anggaran, terlebih dahulu harus juga membiayai pengeluaran-pengeluaran pembiayaan yang telah direncanakan artinya pembiayaan yang dimaksud diatas merupakan pembiayaan neto setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman, pembayaran kegiatan lanjutan serta pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Pembiayaan APBD TA 2012



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

Sebagian besar pengeluaran pembiayaan digunakan sebagai penyertaan modal (investasi) daerah baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Di Provinsi nilainya mencapai Rp3,35 triliun, sedangkan di Kabupaten dan Kota jumlahnya masing-masing Rp2,38 triliun dan Rp624 miliar. Anggaran untuk Pembayaran pokok utang juga relatif besar di Kabupaten dan Kota yaitu sebesar Rp1,66 triliun untuk Kabupaten dan Rp403 miliar untuk Kota.

Beberapa Indikator Dalam APBD TA 2012

Terdapat banyak indikator-indikator yang digunakan dalam menganalisis Keuangan Daerah. Beberapa yang paling populer adalah rasio antara PAD dengan Pendapatan yang menunjukkan derajat kemandirian suatu daerah. Selain itu ada juga rasio antara Transfer Pusat terhadap Pendapatan yang menunjukkan ketergantungan daerah akan transfer dari pusat.

Ringkasan Statistik Beberapa Indikator Keuangan daerah Kabupaten/Kota

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Jumlah Daerah	
						≥ Mean	< Mean
PAD/Pendapatan	477	0.07	0.07	0.00	0.68	154	323
Transfer/Pendapatan	477	0.88	0.09	0.25	1.00	279	198
PAD/Belanja	477	0.07	0.06	0.00	0.64	155	322
Transfer/Belanja	477	0.83	0.11	0.24	1.04	277	200
B.Pegawai/Belanja	477	0.51	0.12	0.15	0.77	275	202
B.Barang/Belanja	477	0.18	0.05	0.08	0.33	214	263
B.Modal/Belanja	477	0.24	0.09	0.06	0.63	200	277

Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah

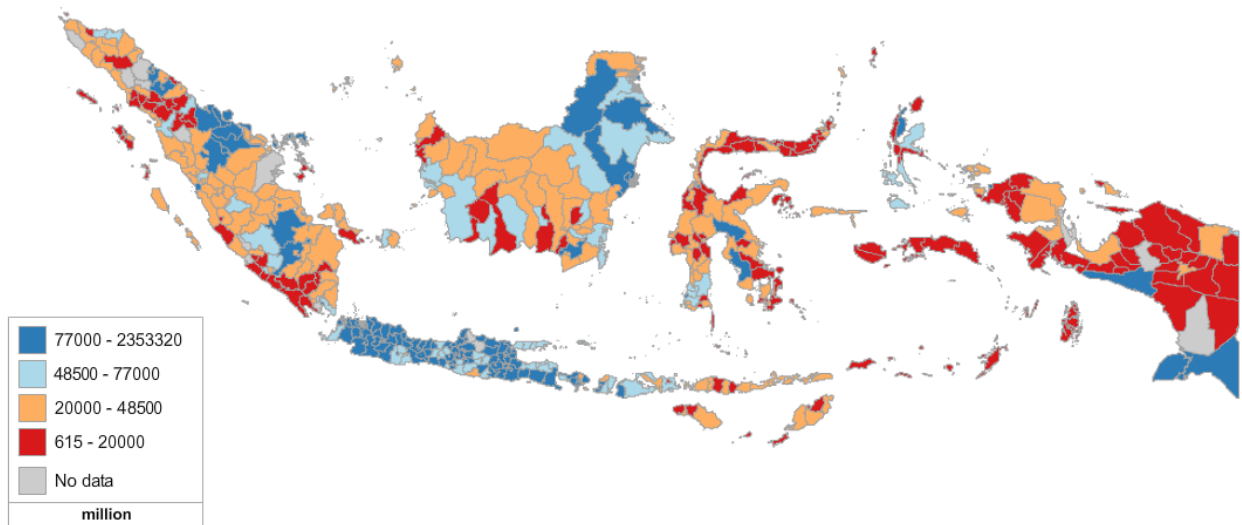
Tabel diatas menunjukkan ringkasan statistik deskriptif beberapa indikator-indikator dalam keuangan daerah untuk Kabupaten/Kota pada APBD TA 2012. Pada rasio PAD/Pendapatan terlihat daerah yang hampir sama sekali tidak memiliki sumber PAD dalam APBD sedangkan sebaliknya daerah yang paling mandiri sanggup menganggarkan PADnya sebesar 68% dari Total Pendapatannya. Sementara itu dengan rata-rata yang hanya 7% menunjukkan bahwa terdapat 154 daerah yang memiliki rasio diatas rata-rata sedangkan sebanyak 323 rasio kemandirian daerahnya dibawah 7%. Sebaliknya rata-rata rasio Transfer Pusat terhadap Pendapatan sangat besar yaitu mencapai 88%. Artinya rata-rata Pendapatan daerah sebesar 88%nya dihasilkan dari Transfer Pusat. Namun jika kita cermati lagi pada rasio antara transfer pusat terhadap belanja terdapat daerah yang transfer pusatnya melebihi belanja daerah yang telah dianggarkan yaitu yang terlihat pada nilai maksimum rasionya sebesar 104%.

Sementara itu jika kita lihat pada porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah, rata-ratanya mencapai 51% dan terdapat 275 daerah yang porsi anggaran belanja pegawainya melebihi 51% dan bahkan hingga mencapai 77%. Sebaliknya porsi belanja barang terhadap belanja relatif rendah dengan rata-rata sebesar 18%. Terdapat 363 daerah yang memiliki porsi anggaran belanja barang dan jasa dibawah 18% dan bahkan paling rendah untuk belanja barang dan jasa pada APBD TA 2012 hingga 8%. Sementara itu porsi penganggaran untuk belanja modal, rata-ratanya hanya sebesar 24% dari total belanja dan sebagian besar berada dibawah rata-rata yaitu sebanyak 277 daerah dan paling rendah hingga mencapai hanya 6% dari total belanja daerah.

Distribusi Spasial Pendapatan Asli Daerah

Secara spasial, dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali, dan NTB serta sebagian wilayah di Kalimantan sedangkan untuk Papua sebagian besar menganggarkan PAD dibawah Rp20 miliar per tahun dan hanya ada dua daerah yang menganggarkan PAD diatas Rp77 miliar per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa basis-basis pendapatan asli daerah di Indonesia tersebar tidak merata dan terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali dan NTB.

Distribusi Spasial Pendapatan Asli Daerah

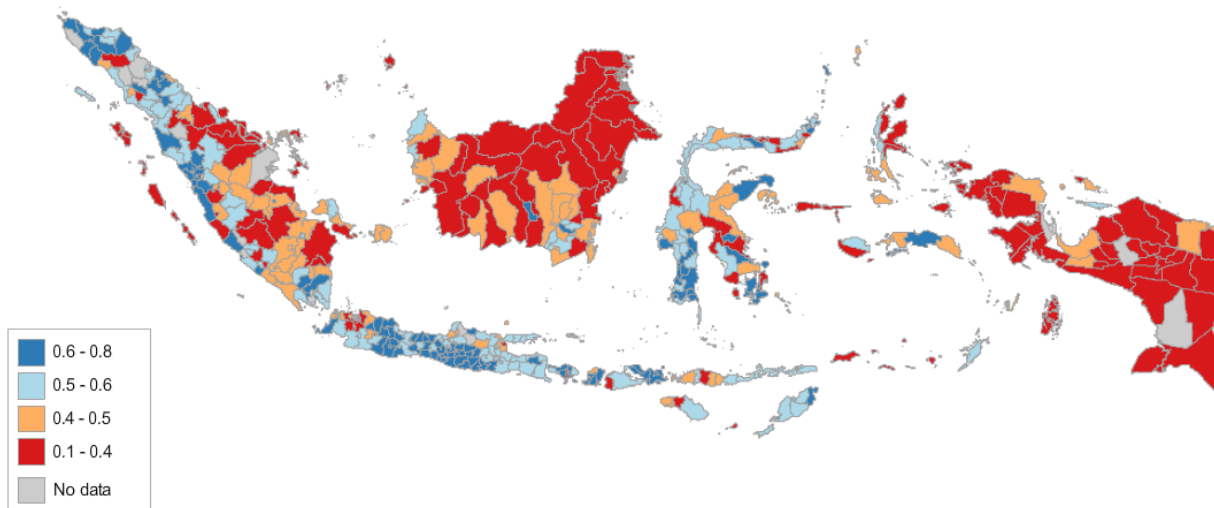


Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah (output statplanet)

Distribusi Spasial Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja

Secara umum memang terlihat porsi belanja pegawai pada umumnya sangat tinggi yaitu mencapai 50% hingga 77% terhadap total belanja. Namun jika kita lihat pada aspek spasial, akan terlihat pola konsentrasi daerah-daerah dengan porsi belanja pegawai yang tinggi maupun yang rendah. Gambar dibawah ini menunjukkan rasio belanja pegawai yang tinggi terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali serta NTB sedangkan untuk rasio belanja pegawai yang rendah terkonsentrasi di wilayah Kalimantan dan Papua. Sementara itu di wilayah Sumatera, Sulawesi dan lainnya rasio belanjanya relatif tersebar atau terdistribusi secara spasial.

Distribusi Spasial Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja



Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD, DJPK – Kemenkeu, diolah (output statplanet)

Lampiran

Proses Konversi Format APBD dalam Permendagri 13 Tahun 2006 ke Format dalam Penulisan

